

**EVALUASI PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN  
KUMUH DI KELURAHAN BULOA KECAMATAN TALLO  
KOTA MAKASSAR**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUH. RIO MIRZA  
D101181334**



**DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
GOWA  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN**

**EVALUASI PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN  
KUMUH DI KELURAHAN BULOA KECAMATAN TALLO  
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**Muh. Rio Mirza  
D101181334**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan  
Kota

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 13 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Wiwik Wahidah Osman, ST., MT  
NIP 196810222000032001

Pembimbing Pendamping,



Laode Muhammad Asfan Mujahid, ST., MT  
NIP 199303092019031014

Ketua Program Studi,



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si  
NIP 197410062008121002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Muh. Rio Mirza

NIM : D101181334

Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

### **Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar**

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa penelitian yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Semua informasi yang ditulis dalam penelitian yang berasal dari penulis lain telah diberi penghargaan, yakni dengan mengutip sumber dan tahun penerbitannya. Oleh karena itu semua tulisan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Apabila ada pihak manapun yang merasa ada kesamaan judul dan atau hasil temuan dalam penelitian ini, maka penulis siap untuk diklarifikasi dan mempertanggungjawabkan segala resiko.

Segala data dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan penelitian, yang akan dipublikasi oleh Penulis di masa depan harus mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi penelitian ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Gowa, 13 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Muh. Rio Mirza

## ABSTRAK

**MUH. RIO MIRZA.** *Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar* (dibimbing oleh Wiwik Wahidah Osman dan Laode Muhammad Asfan Mujahid)

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh Makassar No. 826/653.2/2018, Kelurahan Buloa ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh dengan kriteria berat. Namun, pada SK Kumuh tahun 2021, Kelurahan Buloa tidak lagi termasuk kawasan kumuh berat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kondisi eksisting permukiman kumuh di Kelurahan Buloa, (2) menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap program penanganan permukiman kumuh, (3) mengevaluasi efektivitas Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa. Penelitian menggunakan metode analisis statistik deskriptif, deskriptif kualitatif, pendekatan kualitas standar, Importance-Performance Analysis (IPA), dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kondisi eksisting ditinjau dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Pada aspek fisik, jalanan sudah sesuai, namun drainase, air bersih, bangunan, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum memadai. Dari aspek sosial, masyarakat memiliki kekeluargaan yang erat sehingga permukiman tergolong aman. Di aspek ekonomi, mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh harian. (2) Indikator jalanan memperoleh nilai puas, sedangkan RTH, drainase, bantuan ekonomi, penyuluhan, dan pendampingan mendapat nilai cukup puas. Indikator air bersih dan bangunan dinilai kurang memuaskan. (3) Berdasarkan skala prioritas penanganan, kuadran I mencakup air bersih dan bangunan; kuadran II mencakup drainase, penyuluhan, pendampingan, dan bantuan ekonomi; kuadran III mencakup kedalaman drainase, pemberian tanaman, dan partisipasi masyarakat; kuadran IV mencakup jalanan dan penataan jalur hijau.

**Kata Kunci:** Analisis IPA, Evaluasi Program, Kelurahan Buloa, Permukiman Kumuh

## ***ABSTRACT***

**MUH. RIO MIRZA.** *Evaluation of the Slum Management Program in Buloa Village, Tallo District, Makassar City* (supervised by Wiwik Wahidah Osman and Laode Muhammad Asfan Mujahid)

Based on Makassar Slum Decree (SK) No. 826/653.2/2018, Buloa Village is designated as a slum area with severe criteria. However, in the 2021 Slum Decree, Buloa Village is no longer a heavy slum area. This research aims to: (1) identify the existing conditions of slum settlements in Buloa Village, (2) analyze the level of community satisfaction with the slum management program, (3) evaluate the effectiveness of the Slum Management Program in Buloa Village. The research uses descriptive statistical analysis methods, descriptive qualitative, standard quality approaches, Importance-Performance Analysis (IPA), and spatial analysis. The research results show: (1) existing conditions in terms of physical, social and economic aspects. In terms of the physical aspect, the roads are suitable, but drainage, clean water, buildings and green open space (RTH) are not adequate. From a social aspect, the community has close family ties so that the settlement is classified as safe. In the economic aspect, the majority of the population works as daily laborers. (2) The road indicator received a satisfactory score, while green open space, drainage, economic assistance, counseling and assistance received a fairly satisfactory score. Indicators for clean water and buildings are considered unsatisfactory. (3) Based on the priority scale for handling, quadrant I includes clean water and buildings; Quadrant II includes drainage, extension, assistance and economic assistance; Quadrant III includes depth of drainage, provision of plants, and community participation; Quadrant IV includes roads and green belt arrangements.

**Keywords:** IPA Analysis, Program Evaluation, Buloa Village, Slum Settlements

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN DARI ARTI SIMBOL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Ruang Lingkup .....	3
1.6 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perumahan Permukiman .....	5
2.2 Permasalahan Dalam Penentuan Ruang Perkotaan .....	6
2.3 Permukiman Kumuh .....	7
2.4 Faktor Penyebab Meningkatnya Jumlah Kawasan Kumuh .....	11
2.5 Evaluasi permukiman kumuh .....	12
2.5.1 Pengertian Evaluasi Permukiman Kumuh .....	13
2.5.2 Kriteria Evaluasi Permukiman Kumuh .....	13
2.5.3 Manfaat Evaluasi .....	14
2.6 Penanganan Permukiman Kumuh .....	15
2.7 Analisis <i>Importance Performance Analysis</i> .....	17
2.8 Program Rencana Penataan Lingkungan Perkotaan .....	20
2.8.1 Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh....	20
2.8.2 Konsep Penanganan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh .....	21
2.8.3 Konsep Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	24
2.8.4 Tahapan Perencanaan .....	25
2.8.5 Rencana Tindak Lanjut .....	25
2.8.6 Aturan Bersama .....	26



2.9	Analisis Statistik Deskriptif .....	27
2.10	Penelitian Terdahulu .....	29
2.11	Kerangka Konsep .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Lokasi Penelitian .....	32
3.2	Populasi dan Sampel.....	36
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	38
3.4	Analisis Data .....	38
3.5	Variabel Penelitian.....	40
3.6	Kerangka Penelitian .....	42
3.7	Definsi Operasional.....	43

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum .....	45
4.1.1	Gambaran Umum Kota Makassar .....	45
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Tallo.....	49
4.1.3	Gambaran Umum Kelurahan Buloa.....	50
4.2	Kondisi Eksisting Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa .....	51
4.2.1	Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa.....	51
4.2.2	Kondisi Fisik .....	52
4.2.3	Kondisi Ekonomi .....	72
4.2.4	Kondisi Sosial .....	74
4.3	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa .....	80
4.3.1	Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa .....	80
4.3.2	Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa .....	82
4.4	Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa ....	91

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan .....	102
5.2	Saran .....	103

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	105
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b> .....	108
-----------------------	-----

<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	115
-------------------------------	-----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram kuadran IPA.....	19
Gambar 2 Kerangka konsep .....	31
Gambar 3 Peta administrasi Kota Makassar .....	33
Gambar 4 Deliniasi lokasi penelitian .....	34
Gambar 5 Deliniasi lokasi penelitian .....	35
Gambar 6 Kerangka Pikir .....	42
Gambar 7 Peta administrasi Kota Makassar .....	48
Gambar 8 Peta material bangunan .....	53
Gambar 9 Jalan setapak.....	55
Gambar 10 Kerusakan Jalan Paving .....	55
Gambar 11 Peta jalan lebar 6 meter .....	55
Gambar 12 Jalan lebar 4 meter.....	55
Gambar 13 Peta Jaringan Jalan .....	56
Gambar 14 Kondisi drainase tidak berfungsi.....	57
Gambar 15 Kondisi drainase kotor .....	57
Gambar 16 Peta kondisi jaringan drainase.....	58
Gambar 17 Moda pengangkut sampah jenis truk.....	59
Gambar 18 Moda pengangkut sampah jenis motor roda 3 .....	59
Gambar 19 Kondisi sampah pada drainase .....	60
Gambar 20 Kondisi timbunan sampah .....	60
Gambar 21 Peta titik bank sampah .....	61
Gambar 22 Peta timbunan sampah .....	62
Gambar 23 Peta jalur persampahan .....	63
Gambar 24 Peta sumber air bersih .....	66
Gambar 25 Mobilisasi air bersih warga .....	67
Gambar 26 Kondisi antrian air bersih .....	67
Gambar 27 Petilasan Bastion Maccini Sombala .....	69
Gambar 28 Jalur Pemadam Kebakaran .....	71
Gambar 29 Kondisi jualan masyarakat .....	73
Gambar 30 Kondisi warung masyarakat .....	73
Gambar 31 Kondisi depan rumah pengepul.....	74
Gambar 32 Peta sarana peribadatan .....	76
Gambar 33 Diagram tingkat pendidikan .....	77
Gambar 34 Taman kanak-kanak .....	78
Gambar 35 Sekolah dasar.....	78
Gambar 36 Masjid Nurul Qalbi Buloa .....	78
Gambar 37 Peta radius sarana pendidikan .....	79
Gambar 38 Diagram Kartesius analisis IPA .....	91
Gambar 39 Pembersihan Drainase .....	94
Gambar 40 Pelatihan dasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) .....	95
Gambar 41 Lorong tanaman obat.....	96
Gambar 42 Pemeliharaan rutin lingkungan.....	97
Gambar 43 Pemeliharaan berkala jalanan.....	97



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skor skala <i>likert</i> .....	18
Tabel 2 Interval skor skala <i>likert</i> .....	18
Tabel 3 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 4 Variabel Penelitian .....	40
Tabel 5 Jumlah dan luas Kecamatan Kota Makassar.....	46
Tabel 6 Jumlah penduduk Kota Makassar .....	47
Tabel 7 Jumlah penduduk Kecamatan Tallo .....	49
Tabel 8 Sebaran lokasi permukiman kumuh.....	51
Tabel 9 Jumlah penduduk Kelurahan Buloa .....	52
Tabel 10 Jumlah bangunan.....	52
Tabel 11 Kondisi ekonomi .....	72
Tabel 12 Pendapatan masyarakat .....	72
Tabel 13 Sarana peribadatan radius 500m .....	75
Tabel 14 Sarana peribadatan radius 1000m .....	75
Tabel 15 Tingkat Pendidikan .....	77
Tabel 16 Sarana Pendidikan berdasarkan radius.....	78
Tabel 17 Rencana kriteria dan program yang direncanakan .....	81
Tabel 18 Analisis Tingkat Kesesuaian .....	83
Tabel 19 Tingkat kepuasan indikator drainase.....	84
Tabel 20 Tingkat kepuasan indikator jalanan .....	85
Tabel 21 Tingkat kepuasan indikator air bersih.....	85
Tabel 22 Tingkat kepuasan indikator bangunan .....	86
Tabel 23 Tingkat kepuasan indikator ruang terbuka hijau.....	86
Tabel 24 Tingkat kepuasan indikator bantuan ekonomi .....	86
Tabel 25 Tingkat kepuasan indikator penyuluhan .....	87
Tabel 26 Penilaian terhadap indikator drainase .....	88
Tabel 27 Penilaian terhadap indikator jalanan .....	88
Tabel 28 Penilaian terhadap indikator air bersih.....	89
Tabel 29 Penilaian terhadap indikator bangunan .....	89
Tabel 30 Penilaian Terhadap indikator ruang terbuka hijau .....	90
Tabel 31 Penilaian terhadap indikator bantuan ekonomi .....	90
Tabel 32 Penilaian Terhadap indikator penyuluhan/pendampingan .....	91
Tabel 33 Klasifikasi Kuadran Analisis IPA .....	92
Tabel 34 Kuadran I Analisis IPA .....	92
Tabel 35 Kuadran II Analisis IPA.....	93
Tabel 36 Kuadran III Analisis IPA .....	95
Tabel 37 Kuadran IV Analisis IPA .....	96
Tabel 38 Tabel Sandingan.....	99

## DAFTAR SINGKATAN DAN ARTI SIMBOL

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
SHP	<i>Shapefile</i>
RTH	Ruang Terbuka Hijau
BPS	Badan Pusat Statistik
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
MCK	Mandi, Cuci, Kakus
DTE	<i>Decision Theoretic Evaluation</i>
KDB	Koefisien Dasar Bangunan
IPA	<i>Importance Performance Analysis</i>
LS	Lintang Selatan
BT	Bujur Timur
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
SDM	Sumber Daya Manusia
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan
KOTAKU	Kota Tanpa Kumuh
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
TKi	Tingkat Kesesuaian
Xi	Tingkat Kepuasan
Yi	Tingkat Kepentingan
RPLP	Rencana Penataan Lingkungan Permukiman
PAMSIMAS	Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Survey.....	93
Lampiran 2 Tabulasi data .....	90

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul “Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar” sebagai salah satu penelitian yang melihat atau mengevaluasi program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah bersama masyarakat setempat. penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Kawasan permukiman kumuh di kota-kota besar dan berkembang telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat setempat baik dalam aspek tata ruang, estetika, lingkungan, dan sosial. Salah satu kawasan yang menjadi lokasi permukiman kumuh yang ada di Kota Makassar adalah Kecamatan Tallo lebih tepatnya di Kelurahan Buloa. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada masa depan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala masukan dan saran dari pembaca penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan yang berharga dalam bidang penanganan dan pencegahan permasalahan pada perumahan permukiman kumuh terutama di Kota Makassar.

Gowa, 13 Agustus 2024

(Muh Rio Mirza)

---

### Sitasi dan Alamat Kontak:

Harap menuliskan sumber penelitian ini dengan cara penulisan sebagai berikut:

Muhammad Rio Mirza. 2024. *Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar*. Penelitian Sarjana, Prodi S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin. Makassar.

Demi peningkatan kualitas dari penelitian ini, kritik dan saran dapat dikirimkan ke penulis melalui alamat email berikut ini: [muhriomirzaaa@gmail.com](mailto:muhriomirzaaa@gmail.com)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan pada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini berjudul “Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar” yang menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan S1 Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

Dalam menyelesaikan penelitian ini banyak kendala yang dihadapi peneliti dan dapat diselesaikan berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tersayang (Bapak Munzil dan Ibu Ambita Novaini) dan saudara penulis Atikah Admiral Muthmainna yang juga masih sementara berkuliah di S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin angkatan 2021 yang senantiasa telah memberikan bantuan, motivasi, doa yang tulus, dan dukungan moril serta material sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan penelitian ini;
2. Rektor Universitas Hasanuddin (Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc.) atas segala bentuk kebijakan dan kepemimpinannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Prof. DR. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT.) atas segala bentuk dukungan dan kebijakannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
4. Kepala Departemen Prodi S1-Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Dr. Eng. Ir. Abdul Rachmad Rasyid, ST., M.Si. IPM) dan Sekretaris Departemen Prodi S1- Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Sri Aliyah Ekawati ST., MT.) atas arahan, bimbingan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
5. Sekretaris Mahasiswa Prodi S1- Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Ir. Gafar Lakatupa, S.T., M.Eng.)

6. Kepala LBE *Housing and Settlements Planning* Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Ibu Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si) atas waktu, bimbingan, dan nasihat kepada penulis;
7. Dosen Pembimbing penelitian (Ibu Dr. Ir. Wiwik Wahidah Osman, ST., MT.) yang telah meluangkan waktu dan telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan saran kepada peneliti sejak awal hingga terselesaikannya penulisan penelitian ini;
8. Dosen Pembimbing (Bapak Laode Muh Asfan Mujahid, S.T., M.T) yang telah meluangkan waktu dan telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan saran kepada peneliti sejak awal hingga terselesaikannya penulisan penelitian ini;
9. Kepala Studio Akhir (Ibu Dr. Techn. Yashinta K. D. Sutopo, ST., MIP) yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, motivasi, dan saran kepada peneliti sejak awal hingga terselesaikannya penulisan penelitian ini;
10. Dosen Penguji penelitian (Ibu Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si. dan Ibu Jayanti Mandasari A. Munawara Abduh, ST., M.Eng) yang telah meluangkan waktu dan telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan saran kepada peneliti sejak awal hingga terselesaikannya penulisan penelitian ini;
11. Staf administrasi, seluruh dosen, dan *cleaning service* di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan membantu penulis sejak awal masuk perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
12. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2018 atas segala motivasi, bantuan dan pengalaman berharga yang telah penulis dapatkan dari awal hingga akhir perkuliahan;

Pada akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi pengembang dunia pendidikan.

Gowa, 13 Agustus 2024

(Muh Rio Mirza)

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kawasan permukiman kumuh di kota-kota besar dan berkembang telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat setempat baik dalam aspek tata ruang, estetika, lingkungan, dan sosial. Kota Makassar menjadi salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, kota yang memiliki luas 175,77 km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2023) dengan jumlah penduduk 1.432.189 (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2023) jiwa ini telah menunjukkan diri sebagai kota metropolitan yang mampu bersaing dengan kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan akan perumahan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terkait. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan fasilitas-fasilitas yang terkait tersebut tidak terlepas dari peningkatan penggunaan lahan. Pengembangan kawasan permukiman akibat tidak tertata dan semakin berkurangnya lahan permukiman mendorong peningkatan permukiman kumuh di Kota Makassar.

Salah satu kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar adalah Kecamatan Tallo, tepatnya di Kelurahan Buloa. Berdasarkan SK Walikota Makassar Tahun 2014 No. 050.05/1341/Kep/IX/2014, hingga pada tahun 2018, melalui SK Walikota Makassar No. 826/653.2/Tahun 2018, Kelurahan Buloa kembali dinyatakan sebagai permukiman kumuh dengan kategori berat. Namun, pada tahun 2021, melalui SK Walikota Makassar No. 1301/050.13/Tahun 2021, status Kelurahan Buloa berubah menjadi kawasan yang membutuhkan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Perubahan ini dipengaruhi oleh program RPLP yang berjalan serta adanya berbagai bantuan, seperti CSR bank sampah oleh Pelindo, program lorong wisata, dan pelatihan keterampilan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terkait permukiman kumuh, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar”**



dengan tujuan untuk mengevaluasi terkait program yang telah dijalankan oleh pemerintah apakah telah tepat sasaran dan apa saja kendalanya agar kedepannya dapat diperbaiki dan menjadi saran ke instansi terkait dalam penanganan permukiman kumuh Kota Makassar.

Penelitian ini merujuk pada salah satu penelitian terdahulu yaitu Onesimus, dkk (2022) yang mengkaji terkait Analisis Permukiman Nelayan Yang Kumuh di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan menggunakan metode *action research* yaitu memberi konsep perbaikan dan upaya penanggulangan. Variabel penelitian adalah: Jaringan jalan, persampahan, dan sanitasi lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada Kampung Nelayan yang terletak pada RT 8 RW 2 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar namun mencakup wilayah yang lebih besar yaitu pada RW 1 dan RW 2 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif dan beberapa analisis lain.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi eksisting permukiman kumuh di Kelurahan Buloa?
2. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap program penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Buloa?
3. Bagaimana hasil evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa?

## **1.3 Tujuan Penelitian/Perancangan**

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting permukiman kumuh yang berada di Kelurahan Buloa.
2. Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap program penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Buloa.
3. Mengetahui hasil evaluasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Buloa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian/Perancangan**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian atau informasi terkait implementasi pola penanganan permukiman kumuh di Makassar.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh kedepannya.

#### **1.5 Ruang Lingkup/Asumsi perancangan**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada program kotaku yaitu Rencana Penataan Lingkungan permukiman yang disusun pada tahun 2018 dan telah dilaksanakan pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Buloa untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kelurahan Buloa. Selain itu analisis yang digunakan pada penelitian ini berbasis persepsi masyarakat sebagai dasar dalam perhitungan analisis.

2. Batasan Wilayah

Lingkup penelitian ini berlokasi pada kawasan permukiman kumuh yang terletak di RW 1 dan RW 2 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk sistematika penyusunan laporan penelitian ini, penulis menjelaskan berdasarkan berdasarkan bab-bab, antara lain:

1. Bab I Pendahuluan: Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan pada penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini memuat tinjauan teori dan kerangka pikir yakni, teori-teori yang berkaitan dengan permukiman kumuh dan pola-pola penanganan kawasan permukiman kumuh dan juga memuat penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, serta kerangka konsep.

3. Bab III Metodologi Penelitian: Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pemilihan lokasi penelitian, populasi sampel dan teknik sampling, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kebutuhan data, definisi operasional dan kerangka penelitian.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini menjelaskan kondisi wilayah setempat disertai dengan detail-detail, gambaran umum, menyajikan tinjauan terhadap lokasi penelitian yang dimulai dari Kelurahan Buloa sampai pada detail lokasi penelitian serta uraian mengenai hasil pengolahan data, dan hasil analisa beserta pembahasannya dari pembatasan masalah yang telah dibuat.
5. Bab V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Perumahan dan Permukiman**

Perumahan sebagai salah satu komponen pembentuk suatu kota dengan wilayah atau batas kawasan tertentu yang membentuk struktur tata ruang kota. Struktur ruang permukiman perkotaan terdiri atas beberapa kawasan dengan jumlah penduduk dan luasan tertentu yang membentuk satu kesatuan lingkungan permukiman yang mempunyai satu pusat pelayanan kota. Menurut Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Beberapa pengertian mengenai perumahan dan permukiman menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman (pasal 1), yaitu:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat.
2. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
3. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Definisi permukiman berdasarkan Kamus Tata Ruang tahun 2007 permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman adalah tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap. Permukiman di dalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian yaitu:

1. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
2. Kawasan yang didomisili oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
3. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap.

## **2.2 Permasalahan Dalam Penentuan Ruang Perkotaan**

Perkotaan di Indonesia sedang mengalami percepatan pertumbuhan yang tinggi, yang membawa dampak adanya peningkatan kebutuhan ruang perkotaan dan penyediaan prasarana dan saran dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Namun dibalik perkembangan kota saat ini, ternyata mengakibatkan berbagai macam permasalahan, terutama permasalahan lingkungan di perkotaan. Menjamurnya permukiman kumuh, polusi udara, polusi air adalah beberapa permasalahan lingkungan perkotaan yang muncul di wilayah perkotaan yang ada di Indonesia.

Menurut Prayojana, dkk (2020) Urbanisasi dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. yang menyebabkan laju

pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan ini tentu akan membawa beragam permasalahan di daerah perkotaan seperti kemacetan dan kesemrawutan kota, kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, munculnya pemukiman kumuh atau) terutama pada lahan-lahan kosong seperti jalur hijau disepanjang bantaran sungai, bantaran rel kereta api, taman-taman kota maupun di bawah jalan layang.

### **2.3 Permukiman Kumuh**

Definisi permukiman kumuh suatu area permukiman di suatu kota yang dihuni oleh masyarakat yang umumnya berpenghasilan rendah dan tidak memiliki kepemilikan lahan yang legal sehingga menyebabkan kelompok masyarakat tersebut menempati lahan-lahan kosong ditengah perkotaan menurut Srinivas (2005) dalam Kustiwan dan Ramadhan (2019). Terdapat beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan perumahan informal seperti *low-income settlements*, *spontaneous*, *unplanned*, *squatter*, *slum*, *self-help housing*, *popular settlements*, dan beberapa istilah lainnya. Di Indonesia, perumahan informal ini umumnya banyak ditemukan dalam bentuk kampung, terutama kampung yang berada di kawasan perkotaan atau sering disebut kampung kota.

Kriteria untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Permen PUPR No.14 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung, kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:
  - a. Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:
    - 1) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona.
    - 2) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kaveling bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

- b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
    - 1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL.
    - 2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR dan/atau RTBL.
  - c. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:
    - 1) Pengendalian dampak lingkungan.
    - 2) Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau bawah air, di atas, dan/atau di bawah prasarana/sarana umum.
    - 3) Keselamatan bangunan gedung.
    - 4) Kesehatan bangunan gedung.
    - 5) Kenyamanan bangunan gedung.
    - 6) Kemudahan bangunan gedung.
2. Jalan Lingkungan, kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:
- a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan perumahan atau permukiman.
  - b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.
3. Penyediaan Air Minum, kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:
- a. Ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.
  - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam



lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

4. Drainase Lingkungan, kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup:
  - a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan air dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
  - b. Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
  - c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
  - d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin dan/atau pemeliharaan berkala.
  - e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.
5. Pengelolaan Air Limbah, kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup :
  - a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
  - b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
    - 1) Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik.
    - 2) Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.
6. Pengelolaan Persampahan, kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:

- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
    - 1) Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga.
    - 2) Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan.
    - 3) Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
  - b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Pewadahan dan pemilahan domestik.
    - 2) Pengumpulan lingkungan.
    - 3) Pengangkutan lingkungan.
    - 4) Pengolahan lingkungan.
  - c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa: pemeliharaan rutin dan/atau pemeliharaan berkala.
7. Proteksi Kebakaran, kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:
- a. Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
    - 1) Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, mobil tangki dan *hydran*).
    - 2) Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi.

- 3) Sarana komunikasi yang terdiri dari alat-alat yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada instansi pemadam kebakaran.
  - 4) Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- 1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
  - 2) Kendaraan pemadam kebakaran.
  - 3) Mobil tetangga sesuai kebutuhan.
  - 4) Peralatan pendukung lainnya.

#### **2.4 Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Jumlah Kawasan Kumuh**

Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota menurut Sari dan Ridlo (2021) yang mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di Kawasan perkotaan adalah:

1. Faktor ekonomi

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah kumuh adalah mereka yang memiliki ekonomi rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak dari mereka bekerja di sektor informal. Ekonomi adalah salah satu faktor yang menyebabkan adanya permukiman kumuh. Jika suatu wilayah memiliki ekonomi yang rendah, hal ini akan mempengaruhi penurunan beberapa aspek lainnya.

2. Faktor geografi dan lingkungan

Faktor geografi dan lingkungan yang dimaksud berkaitan dengan lokasi dan ketersediaan lahan, yang semakin sulit didapatkan di perkotaan, khususnya untuk perumahan. Hal ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit mendapatkan lahan di perkotaan karena spekulasi lahan, dominasi kepemilikan oleh golongan tertentu, aspek hukum kepemilikan, dan ketidakjelasan kebijakan pemerintah (Zulkarnaini, dkk (2019) dalam Sari & Ridlo (2021)). Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah membangun tempat tinggal dengan kondisi seadanya di permukiman yang tidak layak demi bertahan hidup.

### 3. Faktor psikologi

Manusia dan lingkungan selalu berinteraksi karena keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Interaksi ini bisa berupa saling membantu atau saling menguasai. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok yang terdiri dari rumah-rumah yang disebut permukiman (Zulkarnaini, dkk (2019) dalam Sari & Ridlo (2021)). Masyarakat Indonesia dikenal memiliki berbagai norma sosial yang melekat pada setiap individu, termasuk di permukiman kumuh. Perbedaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman di antara individu. Seringkali, individu dalam permukiman tersebut tidak saling percaya. Namun, mereka tidak menganggap hal ini sebagai masalah besar karena fokus mereka adalah bertahan hidup di lingkungan tersebut.

### 4. Faktor fisik lingkungan

Perkembangan permukiman kumuh di perkotaan umumnya disebabkan oleh faktor fisik lingkungan yang tidak memadai, seperti sistem drainase, pengelolaan sampah, kondisi tanah dan bangunan, serta jaringan-jaringan lainnya yang sudah menjadi masalah sejak awal. Seiring waktu, permukiman di sekitar kawasan tersebut juga akan terdampak. Jika tidak ada pengendalian, kondisi kawasan tersebut akan semakin memburuk. Perkembangan permukiman kumuh sulit dicegah dan dihindari dalam perkembangan perkotaan, karena sudah menjadi bagian dari struktur ruang kota.

## **2.5 Evaluasi Permukiman Kumuh**

Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan seperti membandingkan dan menganalisis hasil kegiatan. Kegiatan evaluasi sering dilakukan dalam organisasi, perusahaan, atau komunitas tertentu setelah menyelesaikan sebuah kegiatan untuk meningkatkan kualitas. Aktivitas ini bukan tanpa sebab. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu bagaimana itu evaluasi. Berikut ini merupakan penjelasan hal-hal terkait evaluasi:

### **2.5.1 Pengertian Evaluasi Permukiman Kumuh**

Istilah evaluasi menunjuk pada suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu. Evaluasi berarti penentuan sampai seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai. Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu cebakan bahan galian untuk kemungkinan pelaksanaan penambangannya.

Menurut Aswar & Harahap (2021), Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik dan evaluasi dampak adalah kegiatan menilai perubahan-perubahan dalam kondisi kehidupan kelompok sasaran, yang diakibatkan oleh program/proyek dan merupakan hasil kegiatan-kegiatan program/proyek. Sehingga dapat diketahui apakah proyek itu efektif atau tidak.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya evaluasi program dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Jawaban tersebut merupakan dasar untuk mengambil keputusan mengenai keberlanjutan program apakah diteruskan, dihentikan atau diperbaiki. Sehingga dalam evaluasi tidak hanya menjawab apa yang terjadi, mengapa dan bagaimana akan tetapi juga menghadirkan jawaban tentang apa yang sebaiknya dilakukan.

### **2.5.2 Kriteria Evaluasi Permukiman Kumuh**

Dalam pelaksanaan evaluasi, berdasarkan PERMEN PUPR No 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh memiliki kriteria/karakteristik menurut program KOTAKU, yaitu:

1. Kondisi Jalan Lingkungan
  - a. Akses jalanan lingkungan yang melayani seluruh perumahan dan permukiman
  - b. Kualitas permukaan jalan
2. Kondisi Drainase Lingkungan
  - a. Drainase lingkungan tidak tersedia atau tidak mampu mengalir limpahan air hujan sehingga tergenang
  - b. Kualitas kontruksi drainase lingkungan yang buruk
3. Kondisi penyediaan air minum

- a. Akses aman air minum tidak tersedia
  - b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
4. Kondisi bangunan gedung
- a. Ketidakteraturan bangunan
  - b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi tidak sesuai dengan ketentuan rencana ruang
  - c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
5. Kondisi oengelolaan sampah
- a. Sarana dan prasarana persampahan tidak memenuhi persyaratan
  - b. Pengelolaan persampahan tidak ada
6. Kondisi pengelolaan air limbah
- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
  - b. Prasarana pengelolaan limbah tidak ada
7. Kondisi keamanan
- a. Kondisi pengamanan (proteksi) kebakaran
  - b. Sarana dan prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia

#### **2.5.4 Manfaat Evaluasi**

Dalam keperluan jangka panjang dan untuk keperluan keberlanjutan (*sustainable*) suatu program, evaluasi sangat diperlukan. Karena dengan evaluasi maka kebijakan-kebijakan dalam program kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut adalah manfaat perlunya dilakukan evaluasi menurut Syamsiar, dkk (2020):

1. Evaluasi program berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program yang dilaksanakan.
2. Menghentikan program, karena dianggap program tersebut tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
3. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan .
4. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.

5. Menyebarluaskan program, karena program tersebut berhasil dengan baik sehingga dapat dilakukan di tempat lain.

## **2.6 Penanganan Permukiman Kumuh**

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011, penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan, yang terdiri atas:
  - a. Pengawasan dan Pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. Peningkatan kualitas, yang terdiri atas:
  - a. Pemugaran
 

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
  - b. Peremajaan
 

Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
  - c. Pemukiman kembali
 

Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011, bentuk penanganan untuk kawasan kumuh berat berupa peremajaan jika status lahan legal dan permukiman kembali jika status lahan tidak legal. Jika termasuk dalam klasifikasi kumuh sedang maka bentuk penanganan berupa peremajaan jika status lahan legal dan permukiman kembali jika status lahan illegal. Sedangkan untuk kawasan dengan klasifikasi



kumuh ringan dengan status lahan legal adalah pemugaran dan permukiman kembali jika status lahan tidak legal.

Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2015 – 2019 oleh kementerian perumahan rakyat Republik Indonesia, berisi bahwa upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan dengan azas:

1. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya penataan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik, dan pengembangan kegiatan usaha.
2. Pemberdayaan setiap kegiatan diarahkan pada proses pemampuan, penggalian sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (*leading actors*).
3. Perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat.

Komponen penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan fisik lingkungan meliputi rumah susun sederhana sewa (rusunawa), air dan sanitasi, dan sertifikasi lahan.
2. Pembangunan sosial meliputi pendidikan dan kesehatan.
3. Pembangunan ekonomi meliputi pelatihan kewirausahaan dan pinjaman modal usaha.
4. *Capacity building* meliputi pembinaan pengelolaan sarana dan pelatihan pemetaan swadaya.

Prinsip dasar penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Sebagai “Panglima”  
Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendamping daerah dan menciptakan kondisi yang kondusif.
2. Partisipasi Masyarakat  
Sebagai kunci keberhasilan program pelibatan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan.
3. Kolaborasi dan Komprehensif

Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu.

#### 4. Terintegrasi Dengan Sistem Kota

Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota, serta keterpaduan prasarana kota dan kawasan permukiman.

#### 5. Menjamin Keamanan Bermukim

Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mencanangkan suatu gerakan yang dikenal dengan istilah “Gerakan 100 0 100”. Pencapaian gerakan 100 0 100 ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda, tidak hanya mengerahkan sumberdaya pada satu sektor saja melainkan harus melibatkan sebanyak mungkin pelaku dan sektor baik vertikal maupun horizontal serta potensi yang dimiliki masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif dalam seluruh proses pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui platform “kolaborasi”.

## 2.7 Analisis IPA

Analisis IPA ini merupakan suatu metode yang dipergunakan dalam menggambarkan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan (publik). Analisis ini pertama kali diperkenalkan oleh John A. Martilla dan John C. James pada tahun 1977. Analisis ini berguna dalam mengukur korelasi atau keterkaitan antara hal yang dirasakan (kepuasan) oleh konsumen dan tingkat prioritas untuk

meningkatkan kualitas suatu produk/pelayanan dengan menggunakan Analisis Kuadran (Alfatiyah dan Apriyanto, 2019).

IPA memiliki fungsi utama untuk menyajikan informasi terkait faktor-faktor pelayanan yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Jika tingkat kepuasan rendah terhadap pelayanan, itu berarti kualitas pelayanan masih belum mencapai harapan dari konsumen dan begitupun sebaliknya. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan teknik analisis IPA antara lain sebagai berikut:

- a. Menentukan nilai bobot dari variabel yang dikaji. Dalam penelitian ini digunakan skala *likert* untuk mengukur pendapat seseorang terhadap hal yang dikaji. Skala *likert* yang digunakan terdiri dari lima pilihan yaitu :

Tabel 1 Skor skala *likert*

Variabel Kinerja/Kepuasan		Variabel Kepentingan/Harapan	
Skor	Keterangan	Skor	Keterangan
1	Sangat Tidak Puas	1	Sangat Tidak Penting
2	Tidak Puas	2	Tidak Penting
3	Cukup Puas	3	Cukup Penting
4	Puas	4	Penting
5	Sangat Puas	5	Sangat Penting

Sumber : Sugiyono, 2013

- b. Menentukan nilai interval dari nilai bobot yang didapatkan dalam menggunakan skala *likert*. Adapun pembagian interval yaitu:

Tabel 2 Interval skor skala *likert*

Interval	Keterangan Kepuasan	Keterangan Kepentingan
1 – 1.79	Sangat Tidak Puas	Sangat Tidak Penting
1.8 – 2.59	Tidak Puas	Tidak Penting
2.6 – 3.39	Cukup Puas	Cukup Penting
3.39 – 4.91	Puas	Penting
4.2 - 5	Sangat Puas	Sangat Penting

Sumber : Kristy, 2018

- c. Merumuskan tingkat kesesuaian kepuasan masyarakat terhadap program penanganan permukiman kumuh dengan menggunakan rumus tingkat kesesuaian.

$$Tki = \frac{\sum Xi}{\sum Yi} \times 100\%$$

Keterangan:

Tki = Tingkat kesesuaian

$\Sigma X_i$  = Skor penilaian kinerja/kepuasan masyarakat terhadap program BPS

$\Sigma Y_i$  = Skor penilaian tingkat kepentingan masyarakat terhadap program BPS

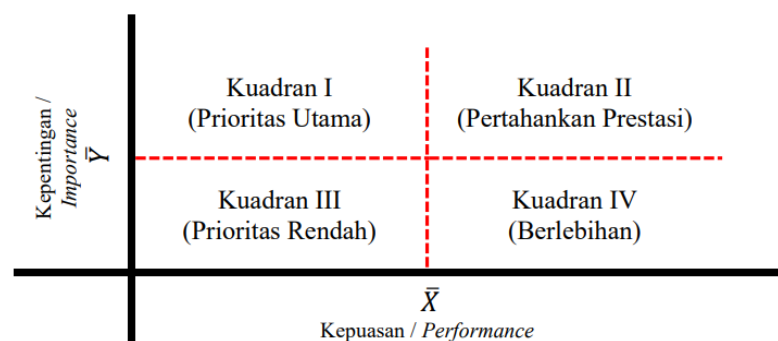
Kriteria Pengujian:

a) Apabila Tki < 100%, maka pelayanan program kurang baik.

b) Apabila Tki = 100%, maka pelayanan program cukup baik.

c) Apabila Tki > 100%, maka pelayanan program sangat baik

- d. Membuat kuadran atau matriks IPA berdasarkan hasil tingkat kesesuaian kepuasan masyarakat terhadap program BPS hasil analisis meliputi empat saran berbeda berdasarkan kepentingan program (*importance*) dan kepuasan masyarakat (*performance*), yang kemudian digolongkan ke dalam kuadran-kuadran seperti berikut :



Gambar 1 Diagram Kuadran IPA

Sumber : Widyawati, 2017

Keterangan :

1. Kuadran I: prioritas utama (*concentrate here*), menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih kecil dibandingkan kepentingan/harapan sehingga memuat indikator-indikator variabel yang perlu untuk ditingkatkan.
2. Kuadran II: pertahankan prestasi (*keep up the good work*), menunjukkan kesesuaian kepuasan dan harapan yang sangat baik dan menjadi poin penting yang perlu diperhatikan sehingga perlu dipertahankan hingga masa mendatang.
3. Kuadran III: prioritas rendah (*low priority*), menunjukkan kesesuaian kepuasan dan harapan yang tergolong masih rendah. Pertimbangan peningkatan indikator pada kuadran ini perlu diperhatikan kembali karena sering kali tidak dianggap penting.

4. Kuadran IV: berlebihan (*possible overkill*), menunjukkan indikator yang terlalu dipentingkan sehingga nilai harapan tinggi sedangkan masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, indikator dalam kuadran ini dianggap berlebihan atau terlalu diperhatikan.

## **2.8 Program RPLP Kelurahan Buloa**

Dalam penyusunan dokumen RPLP, masyarakat dibantu oleh Pemerintah Daerah, fasilitator, dan tim ahli perencanaan kota. Dokumen ini mengidentifikasi kebutuhan investasi dan sumber pembiayaannya melalui rencana aksi dan rencana investasi yang didukung oleh semua pihak terkait. Setelah disusun, dokumen RPLP disahkan oleh Kepala Desa/Lurah, diketahui oleh LKM, dan disepakati oleh pemerintah kabupaten/kota.

### **2.8.1 Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh**

Pola penanganan kawasan kumuh bila mengacu kepada UU. No 1 Tahun 2011 pasal 94-97 terdapat dua pola penanganan, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Implementasi dari program ataupun kegiatan yang mengarah kepada pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman itu, adalah sebagai berikut. Pertama, pencegahan. Kegiatan pencegahan dilaksanakan melalui, dua kegiatan yaitu, pengawasan dan pengendalian: terutama dilakukan oleh pemerintah daerah mencakup kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pemberdayaan masyarakat: melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Bisa dikatakan Program Kotaku secara umum masuk dalam kategori penanganan kawasan kumuh ini. Kedua, peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan

kebijakan, secara holistik, penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilakukan secara multisectoral karena memerlukan koordinasi dengan berbagai bidang lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman dan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Pola peningkatan kualitas lingkungan permukiman itu dilaksanakan melalui tiga kategori:

1. Pemugaran, yakni kegiatan perbaikan bangunan gedung, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum yang dilakukan tanpa perombakan mendasar dan bersifat parsial, terutama dilakukan kepada kawasan dalam kategori kumuh ringan.
2. Peremajaan, yakni kegiatan yang dilaksanakan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan gedung, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. Biasanya dilakukan kepada kawasan yang masuk dalam kategori kumuh sedang.
3. Permukiman kembali, yaitu dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi dengan klasifikasi status lahan legal, biasanya dilakukan di kawasan yang masuk dalam kategori kumuh berat.

### **2.8.2 Konsep Penanganan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh**

Dalam hal pembahasan terkait dengan konsep penanganan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh terdapat beberapa hal mendasar yang sering kali digunakan oleh pihak terkait, contohnya adalah

1. Pengawasan dan pengendalian

Dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh. Pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh dilakukan secara berkala terkait kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi dari bangunan, prasarana, sarana, dan utilitas umum. Hal ini memerlukan kecermatan pemerintah kabupaten/kota yang berwenang dalam mengeluarkan izin dan sertifikat laik fungsi. Selain itu, juga diperlukan dukungan masyarakat

dengan cara melaporkan apabila mengetahui adanya ketidaksesuaian di suatu kawasan sehingga dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

## 2. Pemberdayaan masyarakat

Dalam hal pencegahan kawasan permukiman kumuh sangat dibutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat sebagai unsur yang turut serta berperan dalam mengubah kawasan tempat tinggal mereka menjadi lebih baik. Hal ini juga membuat beberapa peneliti melakukan penelitian terkait bagaimana pentingnya memberdayakan masyarakat di kawasan permukiman kumuh sebagai unsur yang membantu program pemerintah.

## 3. Penyediaan ruang terbuka hijau

Ruang terbuka hijau tidak hanya dibutuhkan pada kawasan permukiman kumuh tetapi ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan di kawasan perkotaan. Fungsi utama RTH adalah membantu menyeimbangkan kondisi ekologis kota karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap karbon dioksida sekaligus menyimpan air. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota juga berperan sebagai pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan. Keberadaan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan.

## 4. Perencanaan berbasis partisipatif

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pada tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting dari proses pembangunan. Berdasarkan asumsi para ahli pembangunan, semakin tinggi perhatian atau keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, maka akan memberikan hasil yang lebih optimal. Perencanaan pembangunan berkonsep partisipatif berawal dari kepercayaan keberhasilan program-program yang ditetapkan oleh seluruh komitmen stakeholder. Perencanaan partisipatif yang disusun oleh pemerintah daerah mengacu pada regulasi yang disusun oleh pemerintah pusat.

## 5. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Penguatan kapasitas lembaga ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat, adalah salah satu model peningkatan peran serta masyarakat dalam

kegiatan yang dirancang dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran dan memberdayakan masyarakat lewat lembaga ekonomi lokal untuk menopang perekonomian masyarakat itu sendiri. Peningkatan kapasitas kelembagaan berarti usaha untuk meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat yang mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya.

#### 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung itu. Diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan SDM yaitu: peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan; serta pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.

#### 7. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat

Pengembangan potensi ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi melalui potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat baik berdasarkan kondisi sumber daya manusia atau sumber daya alamnya yang melimpah.



### 2.8.3 Konsep Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan data dari Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Makassar didapatkan data hasil olahan terkait dengan apa saja konsep peningkatan dan pencegahan serta konsep pencegahan terhadap lokasi prioritas yang ada di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Berikut ini adalah Konsep Pencegahan kawasan permukiman kumuh di RT 2 RW 2 dan RT 4 RW 1:

1. Penerapan Aturan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Pengembangan infrastruktur melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat.
3. Pengendalian perkembangan permukiman.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat.
6. Peningkatan akses ekonomi masyarakat.

Selain itu terdapat juga konsep peningkatan dan konsep pencegahan kawasan permukiman kumuh yang diterapkan pada RT 4 RW 2 dan RT 6 RW 2 Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo. Berikut ini adalah konsep pencegahan kawasan permukiman kumuh :

1. Penerapan Aturan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Pengembangan infrastruktur melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4. Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat.
5. Peningkatan akses ekonomi masyarakat.

Berikut ini adalah konsep peningkatan kawasan permukiman kumuh:

1. Peningkatan kualitas permukiman secara berkelanjutan
2. Normalisasi saluran drainase
3. Peningkatan frekuensi dan distribusi pelayanan air minum
4. Peningkatan pengelolaan persampahan
5. Peningkatan pengelolaan persampahan
6. Peningkatan pengelolaan air limbah secara terpadu
7. Penataan ruang terbuka hijau

#### **2.8.4 Tahapan Perencanaan**

Tahapan dalam merumuskan rencana penataan lingkungan permukiman yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman dengan rencana strategi dan skenario penanganan permukiman kumuh adalah:

1. Melakukan coaching/on the job training terkait kegiatan perencanaan RPLP kepada lurah/kepala desa.
2. Menyusun rencana kegiatan.
3. Melakukan diskusi dan rembuk untuk merumuskan arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman untuk kurun waktu 5 tahun dan diselaraskan dengan strategi dan skenario penanganan permukiman kumuh.
4. Merumuskan matrik program investasi.
5. Merumuskan aturan bersama.
6. Melakukan sosialisasi hasil perencanaan.

#### **2.8.5 Rencana Tindak Lanjut**

Penanganan kawasan permukiman kumuh adalah kegiatan yang terkait dengan aspek yang cukup luas dan mencakup berbagai bidang, sehingga pengembang didalam mengelola kawasan tersebut harus melakukan kajian Manajemen Pengelolaan Kawasan atau Estate Management. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk melihat dan mengantisipasi timbulnya perkembangan dan perubahan terutama dalam hal pemenuhan pelayanan serta fasilitas pendukung pengembangan kawasan permukiman.

Estate Manajemen pada dasarnya adalah pengelolaan suatu kawasan permukiman yang mencakup ketersediaan berbagai fasilitas dan layanan meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti lapangan olahraga, sekolah, dan tempat ibadah. Lebih jauh lagi, hal yang menjadi tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas keamanan, kebersihan, dan sampah, pengendalian banjir dan kebakaran, infrastruktur, air minum dan lainnya untuk kepentingan penghuninya. Untuk penerapannya di Kelurahan Buloa Estate Manajemen akan ditangani oleh masyarakat sendiri, dimana ketua RW (Rukun Warga) menjadi koordinator puncak dan masing-masing Ketua RT (Rukun Tetangga) sebagai koordinator

tingkat warga. Segala pembiayaan untuk mendukung operasional pengelolaan lingkungan dipikul seluruh warga.

Dalam hal ini warga Kelurahan Buloa akan saling bahu membahu mensukseskan pengelolaan lingkungan secara mandiri, Namun sebelum itu dapat dilakukan, kesadaran dan kepedulian masyarakat masih harus terus ditingkatkan. Ini akan menjadi tantangan yang berat, sehingga didalam prosesnya nanti dibutuhkan kesabaran serta dedikasi yang tinggi dalam mensosialisasikan serta membina warga yang bersangkutan agar dapat dan mau terlibat dalam mengelola kawasan permukiman mereka sendiri.

### **2.8.6 Aturan Bersama**

Aturan bersama adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat sebagai pengendalian, pengawasan, dan evaluasi bagi hasil perencanaan yang telah direncanakan bersama- sama, sehingga perencanaan yang dibuat dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman menjadi berlanjut dan memberikan hasil yang efektif untuk pengembangan secara keseluruhan. Kesepakatan-kesepakatan nantinya akan diatur dalam bentuk Aturan Bersama (AB) diantaranya adalah kesepakatan tentang aturan pembangunan yang ditinjau dari enam aspek:

1. Kesepakatan dari sisi tata ruang.
2. Kesepakatan dari sisi perumahan bangunan.
3. Kesepakatan dari sisi Sarana & prasarana.
4. Kesepakatan dari sisi Ekonomi.
5. Kesepakatan dari sisi Pelayanan publik.
6. Kesepakatan dari sisi Kelembagaan.

Hasil kesepakatan ini nantinya didapatkan dari hasil rembuk yang diambil di tingkat basis oleh TIPP/BKM/Pokja-Pokja. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang nantinya melaksanakan dapat mematuhi, aturan yang dibuat sendiri. Seringkali terjadi, proses perencanaan partisipatif menyepakati pembangunan sebuah jaringan infrastruktur tertentu. Program tersebut amat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, sehingga hamper tidak ada penolakan terhadap program, namun pada tataran operasinalisasi, kegiatan menemui banyak kendala diantaranya misalnya:

1. Tidak disepakati siapa-siapa saja bertindak sebagai pelaksana pekerjaan tersebut.
2. Siapa pihak-pihak yang bertugas memonitor proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standart dan mandat yang diinginkan.
3. Apa timbal balik yang diberikan oleh pihak-pihak yang diuntungkan namun tidak terlibat dalam proses.
4. Siapa yang akan mengelola dan merawat jaringan pasca dibangun.
5. Siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi kerusakan.
6. Dari mana dana mesti didapatkan untuk pemeliharaan dan perbaikan, serta sejumlah masalah yang lain.

Kegagalan membangun kesepakatan-kesepakatan ini mampu menimbulkan permasalahan krusial terutama terkait dengan terjaminnya keberlangsungan/sustainabilitas. Jika kegagalan pengelolaan tersebut terjadi maka akan mengakibatkan penurunan kepercayaan publik/masyarakat terhadap prosesproses partisipatif yang telah dikembangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk kegiatan pembangunan di Kelurahan Buloa dikelompokkan usulan acuan untuk menjadi Aturan Bersama, yaitu Lingkungan Hidup & Tata Ruang, Ekonomi dan Sosial-Budaya. Dalam masing-masing pembagian tersebut nantinya akan diuraikan lebih detil lagi kegiatan-kegiatan yang akan diatur. Dalam bagian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, tema-tema yang diatur yaitu mengenai Penataan bantaran sungai dan Kawasan pesisir, Penghijauan dan ruang terbuka, Perumahan dan bangunan, Mitigasi bencana, Pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan dan akses jalan lingkungan. Dalam bagian penataan Ekonomi, detil tema-tema yang diatur yaitu: Pengaturan pro ekonomi lokal, Pengaturan PKL, Pengaturan sentra-sentra ekonomi dan home industri, Pengaturan investasi lahan dan Pemasaran program-program pembangunan.

## **2.9 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif atau statistik deduktif merupakan suatu metode bagaimana cara mengumpulkan angka-angka, menabelkan angka-angka, menggambarannya, mengolah dan menganalisis angka-angka tersebut serta menginterpretasikannya dengan memberi penafsiran atau dengan perkataan lain, merupakan suatu metode

tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan angka-angka dalam bentuk catatan untuk selanjutnya bagaimana cara menyajikan angka-angka tersebut dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan. (Silvia,2020).

Tujuan utama analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai variable-variabel yang digunakan, seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi pada masing-masing penelitian. Analisis statistik deskriptif menunjukkan gambaran kondisi dan karakteristik jawaban responden untuk masing-masing konstruk atau variabel yang diteliti. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai rata-rata, skor total, dan Tingkat Capaian Responden (TCR), serta menginterpretasikannya. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sehingga dapat disajikan dalam tampilan yang lebih baik (Ghozali, 2016).

Statistik deskriptif merupakan metode untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel dalam suatu penelitian. Tujuan digunakannya statistik deskriptif diharapkan dapat memberikan penjelasan secara umum mengenai masalah yang dianalisa agar pembaca lebih mudah untuk memahaminya.

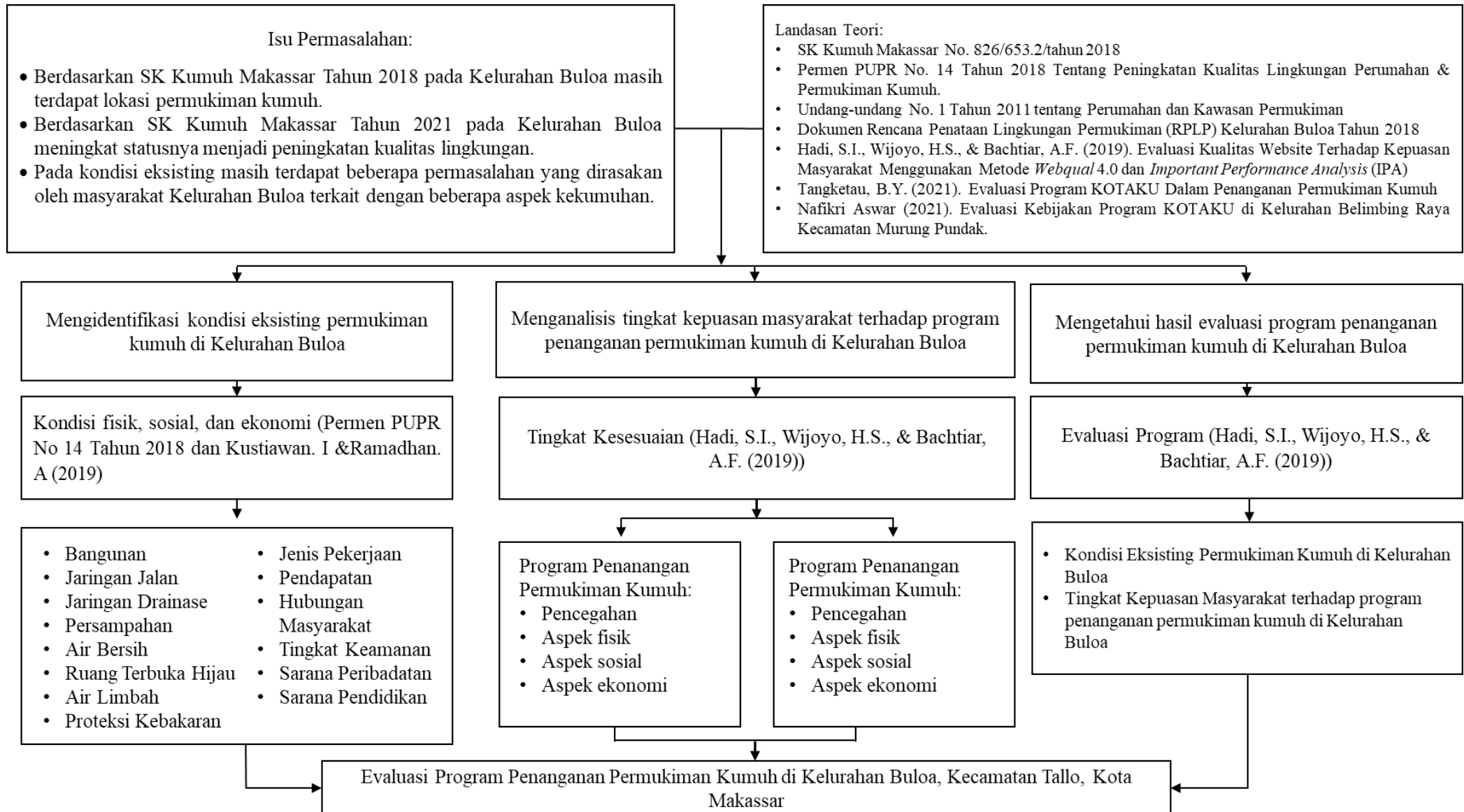
## 2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Ikrom Septian Hadi, Satrio Hadi Wijoyo, Fitra Abdurrachman Bachtiar 2019	Evaluasi Kualitas Website Terhadap Kepuasan Masyarakat Menggunakan Metode <i>Webqual</i> 4.0 dan <i>Importance Performance Analysis</i> (IPA)	<i>Importance and Performance Analysis</i> (IPA) yang terdiri dari analisis tingkat kesesuaian, analisis <i>gap</i> , serta analisis kuadran IPA	Menggunakan analisis IPA	Variabel dan indikator yang ditinjau berbeda	Hasil analisis kualitas <i>Website</i> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang menunjukkan bahwa <i>Website</i> tersebut memiliki tingkat kesesuaian <100% yaitu sebesar 94,53%, Artinya tingkat kinerja <i>Website</i> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang masih dibawah tingkat kepentingan atau tidak sesuai dengan harapan pengguna.	Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 3, No. 1, Januari 2019, hlm. 723-727
2	Arwiny Ramadhani dan Ismail 2019	Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.	Analisis Deskriptif Kualitatif	Meninjau penanganan pada permukiman kumuh.	Pada penelitian melakukan evaluasi terhadap program.	Hasil penelitian menunjukkan penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Tamalate sudah efektif. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil wawancara dengan melihat indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran.	Diploma thesis, Universitas Negeri Makassar 2019

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
3	Nafikri Aswar dan Ahmat Harahap 2021	Evaluasi Kebijakan Progran KOTAKU di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pundak	Analisis Deskriptif Kualitatif	Membahas terkait evaluasi program KOTAKU.	Analisis dan lokasi penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan program (KOTAKU) di katagorikan berdampak dengan hasil bobot 4 dikarenakan dalam kegiatan program KOTAKU sudah berjalan dengan baik dan berdampak bagi masyarakat hanya saja diperlukan lebih efektif dan efesien dalam proses perkembangan pembangunan.	Jurnal urnal Administrasi Publik dan Bisnis. Vol 4, No. 2, 2021, hlm. 854-858
4	Yulvira B. Tangketau 2021	Evaluasi Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh	Analisis deskriptif dengan menggunakan Analisis Kualitatif dan Kuantitatif	Menggunakan analisis IPA pada penanganan permukiman kumuh.	Analisis dan Lokasi penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kotaku dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette sudah cukup berhasil dalam mencapai tujuannya (cukup efektif), tidak berhasil dalam usaha yang dilakukan (tidak efisien) selama pelaksanaan program, cukup berhasil dalam tingkat manfaat/dampak kecukupan) dalam pelaksanaan program, cukup berhasil dalam persepsi masyarakat (responsifits) selama pelaksanaan program dan cukup berhasil dalam ketepatan.	Skripsi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 2021

## 2.11 Kerangka Konsep



Gambar 2 Kerangka Konsep

Sumber: Penulis, 2024